

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

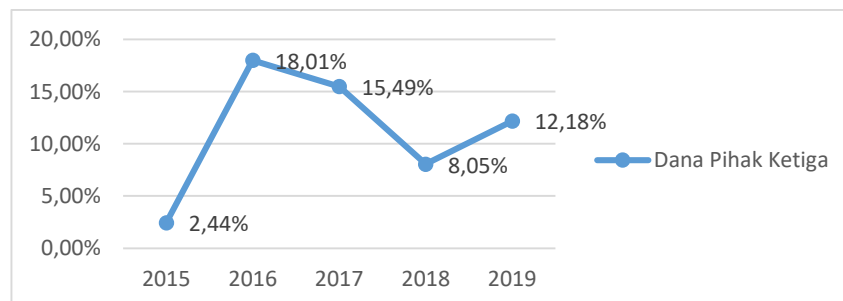
Pada awal perkembangannya, Bank Syariah hadir sebagai tanggapan dari kelompok ekonomi dan para ahli perbankan muslim yang mencoba dalam memenuhi dorongan dari beragam pihak yang memiliki keinginan supaya pelaksanaan jasa transaksi keuangannya selaras dengan nilai, moral dan prinsip-prinsip Islam (Suryani, 2012). Secara umum, Indonesia menganut dua jenis operasional perbankan di antaranya adalah bank konvensional dan bank syariah. Sesuai yang tertera dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang menyatakan jika Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bank Indonesia, 2008)

Berdasarkan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat, aspek *muamalah* yang mengatur hubungan sesama manusia merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam (Gampito, 2014). Akan tetapi, jika melihat dari isu yang saat ini berkembang, pangsa pasar dari perbankan syariah yang ada di Indonesia memiliki nilai yang kecil apabila dibandingkan dengan negara lainnya yang sebagian besar penduduknya menganut agama islam. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah rendahnya literasi mengenai keuangan islam yang dimiliki mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai perbandingan, nilai *market share* perbankan syariah di Malaysia pada akhir tahun 2019 sudah diatas 21%. Tantangan perbankan syariah di Indonesia apabila dibandingkan dengan Malaysia yaitu bahwa mayoritas penduduk Indonesia memandang bank syariah hanya dikhususkan untuk kalangan orang islam semata, namun pada kenyataannya tidak demikian karena keuangan islam menawarkan sistem perekonomian yang berasaskan keadilan serta keterbukaan (Marsyaf, 2019). Data saat ini menunjukkan bahwa *market share* dari perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2018 hanya sekitar 5,7 persen

(Septyaningsih & Zuraya, 2018) dan meningkat pada awal 2020 dengan *market share* sebesar 8,29% (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2020). Peningkatan *market share* dari perbankan syariah tidak lepas dari kebijakan konversi bank umum daerah menjadi bank syariah, diantaranya adalah Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah.

Persoalan lain yang berkaitan dengan bank Syariah di Indonesia berdasarkan fakta yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah bahwa bank syariah di Indonesia tengah mengalami perlambatan pertumbuhan total *asset* bank syariah sebesar 23,29 persen di kuartal dua tahun 2017 menjadi 14,58 persen di kuartal dua tahun 2018. Perlambatan asset ini diakui sebagai dampak kebijakan internal dari perbankan syariah yang tengah berupaya memperbaiki kualitas pembiayaan (Winarto, 2018).

Perlambatan aset tersebut disinyalir disebabkan dua faktor, (1) karena memang terjadi penurunan nilai dari dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat atau (2) ketidakmampuan bank di dalam menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat, padahal komponen yang paling penting dan utama dari aset perbankan dapat terlihat melalui kondisi DPK, di mana seringkali ditunjukkan dengan sebuah korelasi positif antara DPK dan aset atau semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun maka akan semakin besar pula aset perbankan tersebut. Dengan adanya dana pihak ketiga ini, bank dapat beroperasi sebagai lembaga intermediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan akan terus meningkat (Setiawan, 2015). Namun meskipun Dana Pihak Ketiga mengalami penambahan pada komposisinya tetapi apabila dilihat dari pertumbuhannya, Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2019)

Gambar 1. 1
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar 1.1 dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 2,44 persen menjadi 18,01 persen, namun dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 18,01 menjadi 15,49 pada tahun 2017 dan 8,05 persen pada tahun 2018 kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019. Terdapat hal-hal yang menjadi penyebab dana pihak ketiga fluktuatif. Penyebab kenaikan dana pihak ketiga tahun 2015-2016, karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.66/KMK.03/2016 perihal penetapan bank-bank sebagai penerima uang tebusan dalam rangka *tax amnesty* dengan menyertakan tiga BUS (Bank Umum Syariah) berdampak pada kontribusi positifnya terhadap kinerja keuangan perbankan, khususnya terkait dengan dana pihak ketiga. Sedangkan penurunan dan pihak ketiga pada tahun 2016 hingga 2018 disebabkan karena *non performing financial* (NPF) dari Bank Umum Syari'ah mulai memburuk pada tahun 2015, sehingga pada tahun berikutnya yaitu 2016-2017 merupakan perbaikan untuk memulihkan NPF, hal inilah yang berkontribusi membuat kinerja BUS dan DPK menurun (Khalil, 2018). Sementara itu peningkatan DPK dari perbankan syariah periode 2018-2019 karena besarnya kampanye dalam penggunaan bank syariah (Yuniar, 2019) serta didukung oleh masuknya dana haji secara signifikan (Sitanggang, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah belum dapat konsisten dan optimal dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga dapat menjadi identitas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank yang bersangkutan, atau semakin tinggi dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap bank tersebut. Namun, apabila dana pihak ketiga semakin turun maka menunjukkan bahwa kepercayaan pada bank pula semakin menurun (Wulandari, 2013).

Asset lebih spesifik harus diperhatikan karena sumber utamanya yang berasal dari Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah simpanan masyarakat yang

Eliana Siti Sugiharti, 2020

ANALISIS PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dipercayakan kepada bank dalam bentuk deposito dan tabungan. Sumber dana ini merupakan sumber yang penting untuk keberlangsungan operasional bank dan menjadikan sebuah ukuran keberhasilan bank apabila mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini (Husai & Abdullah, 2015).

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berasal dari nasabah yang diberikan kepada bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki oleh bank syariah. Pertumbuhan bank dipengaruhi oleh perkembangan performanya di dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki masalah utama yaitu dana. Bank tidak menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal tanpa dana yang cukup. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank syariah, hal ini menunjukkan semakin banyak pula jumlah dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Syarvina, 2018).

Penurunan dari Dana Pihak Ketiga akan memengaruhi Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD). Maka, perkembangan suatu bank sangat bergantung kepada kemampuan bank di dalam menghimpun dana dari masyarakat. Hal lain menunjukkan bahwa kemampuan di dalam menghimpun Dana Pihak ketiga antara perbankan syariah dengan Perbankan Umum Konvensional yang bekerja pada situasi makroekonomi Indonesia yang berubah-ubah akan menentukan peran dari Perbankan syariah nasional di dalam perekonomian negeri (Muttaqiena, 2013).

Pertumbuhan dana pihak ketiga penting agar tetap terjaga, karena untuk memenuhi masifnya pembiayaan nasabah serta untuk mengembangkan ekonomi masyarakat pada sektor riil. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan sektor riil menempatkan bank syariah supaya dapat menjadi kontributor dalam salah satu lembaga keuangan yang pro sektor riil.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang penting dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi mikro, peranan ini yaitu sektor UMKM yang lebih menyentuh dan mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, kemudian dapat menyerap tenaga kerja skala besar, serta sektor yang memiliki potensi memberikan sumbangan pada

Eliana Siti Sugiharti, 2020

ANALISIS PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

PDB (Syarvina, 2018). Sehingga dana bank ini memiliki posisi yang penting dalam lembaga perbankan dan harus dikelola secara optimal, karena dana yang digunakan secara optimal akan memberikan keleluasaan bagi perbankan berkenaan dengan likuiditas maupun aspek pembiayaannya (Ferdiansyah, 2015).

Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun *volume* DPK pada perbankan syariah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun dari eksternal perbankan syariah, contohnya seperti faktor makroekonomi dan mikro ekonomi (Setiawan, 2015). Namun perbankan syariah masih dipandang tidak memiliki perbedaan dengan bank konvensional ketika menghadapi situasi eksternal. Menurut Chapra (2008) bahwa perbankan syariah masih rentan dalam menghadapi kondisi global.

Kondisi ekonomi makro akan mempengaruhi perusahaan dan masyarakat dalam bertransaksi dengan perbankan, ketika kondisi ekonomi membaik akan meningkatkan pula pendapatan masyarakat yang dapat berdampak pada meningkatnya jumlah Dana Pihak Ketiga (Panorama, 2016). Kenaikan dari Dana Pihak Ketiga ini dapat dipengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Indonesia seperti peraturan Bank Indonesia seperti *BI rate*, melemahnya nilai tukar valuta asing, kebijakan pemerintah, terjadinya inflasi, kondisi politik, kondisi pasar uang dan pasar modal, hingga pada jumlah uang yang beredar (Nofinawati, 2018).

Inflasi merupakan salah satu faktor dari luar yang dapat berdampak pada kinerja perbankan. Inflasi merupakan suatu keadaan ekonomi yang dihadapkan pada situasi di mana terjadi kenaikan harga tidak dapat dicegah atau pun dikendalikan kembali. Perbankan harus mengatasi inflasi yang melanda perekonomian Indonesia. Agar dapat menarik investor untuk berinventasi dan juga nasabah untuk dapat menyimpan uang mereka. Dengan adanya inflasi dapat memberikan keuntungan untuk bank sebab masyarakat memiliki preferensi untuk menyimpan uang mereka daripada untuk berbelanja barang (Meiliana & M.N, 2020). Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan pernyataan (Wulandari, 2013) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) karena tingginya tingkat inflasi akan mendorong naiknya tingkat suku bunga pada bank

konvensional guna menarik DPK, semakin tinggi suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional, maka akan berpengaruh secara negatif terhadap total DPK BUS.

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi DPK adalah faktor Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). PDB seringkali menjadi indikator kegiatan produksi sebuah negara, dengan asumsi bahwa jika PDB naik, maka dapat menggambarkan kegiatan produksi negara tersebut meningkat (Rudiansyah, 2014; Saekhu, 2017). Pada skenario tersebut, maka masyarakat yang memiliki faktor produksi jika kita lihat secara agregat akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Dampak dari meningkatnya PDB tersebut adalah berbanding lurus dengan jumlah dana yang dapat dialokasikan pada bank (*saving*). Pada akhirnya, hal tersebut dapat membuat sebuah bank lebih mudah di dalam menjaring masyarakat sehingga DPK akan mengalami peningkatan.

Selain faktor eksternal, terdapat faktor internal yang dapat mempengaruhi dana pihak ketiga, yaitu bagi hasil. Menurut Natalia (2014) adanya scenario bagi hasil dapat berdampak pada transparansi kinerja bank syariah, sehingga para nasabah dapat memantau kinerja bank syariah tersebut dengan melihat jumlah bagi hasil yang diperoleh. Keberadaan transparansi kinerja bank tersebut akan menjadi *signal* bagi nasabah untuk menyimpan dananya pada bank syariah. Selain memberikan scenario bagi hasil kepada para nasabah, bank juga diperkenankan untuk memberikan insentif untuk produk yang berakad *wadiah* (Mumtazah & Septiarini, 2016)

Beberapa penelitian terdahulu pernah membahas faktor variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap dana pihak ketiga, akan tetapi masih terdapat perbedaan hasil penelitian atau *research gap* di dalam penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan (Saekhu, 2017) menunjukkan bahwa variabel PDB memiliki pengaruh terhadap peningkatan DPK (Dana Pihak Ketiga) secara positif dan signifikan dan inflasi memiliki pengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Muttaqiena, 2013) menunjukkan bahwa PDB Harga Konstan berpengaruh terhadap DPK Perbankan Syariah dengan korelasi negatif yang signifikan dan Inflasi IHK berpengaruh negatif secara signifikan terhadap DPK Perbankan Syariah.

Penelitian dana pihak ketiga ini menjadi hal penting karena dari isu yang ada bahwa *market share* perbankan syariah dinilai kecil apabila dibandingkan dengan negara yang penduduknya mayoritas memeluk islam lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa total asset perbankan syariah mengalami perlambatan karena sebagai upaya perbaikan kualitas pembiayaan, di mana dana pihak ketiga ini berperan sebagai prediksi terhadap asset sehingga dana pihak ketiga ini perlu ditingkatkan guna meningkatkan pula asset sehingga *market share* perbankan syariah akan meningkat pula, namun pada data yang ada bahwa dana pihak ketiga mengalami penurunan pada tahun 2018 meskipun kembali meningkat pada tahun 2019 sehingga dana pihak ketiga pada pertumbuhannya perlu ditingkatkan yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional bank syariah.

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan di atas perlu diteliti mengingat pentingnya dana pihak ketiga yang merupakan modal utama perbankan syariah, modal inilah yang merupakan motor penggerak bank sebagai perusahaan dalam mencapai tujuan. Perkembangan ekonomi yang otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola hidup masyarakat indonesia. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat menyimpan dananya baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito di bank. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji perihal **“ANALISIS PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah di Indonesia dinilai masih kecil bila dibandingkan dengan negara mayoritas Muslim lainnya. Pada tahun 2018 pangsa pasar perbankan syariah Indonesia baru sekitar 5,7 persen (Septyaningsih & Zuraya, 2018) dan tumbuh menjadi 8,29% pada tahun 2020 (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2020).

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan total aset bank syariah mengalami perlambatan dari 23,39% di kuartal 2 2017 menjadi 14,58% di kuartal 2 2018. Sekar Putih Djarot, Juru Bicara OJK menyatakan bahwa pertumbuhan aset yang melambat ini dampak dari kebijakan internal perbankan syariah yang terus berupaya memperbaiki kualitas pembiayaan (Winarto, 2018).
3. Aset perbankan, khususnya di Indonesia, secara signifikan dapat diprediksi oleh Dana Pihak Ketiga. Dengan kata lain, komponen utama aset perbankan dapat dilihat melalui DPK, semakin besar DPK maka akan semakin besar pula aset perbankan tersebut. Dengan posisi yang sangat vital tersebut, setiap bank berlomba-lomba untuk dapat menghimpun DPK sebesar mungkin (Setiawan, 2015).
4. Pertumbuhan dana pihak ketiga mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 2,44 persen menjadi 18,01 persen, namun dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 18,01 menjadi 15,49 pada tahun 2017 dan 8,05% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah belum optimal dalam menghimpun dana masyarakat.
5. Penurunan DPK juga akan mempengaruhi Pembiayaan yang Disalurkan (PYD). Dengan demikian, perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat (Muttaqiena, 2013).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan hal-hal yang akan dikaji oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aktual Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Bagi Hasil?
2. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah tahun 2014-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah tahun 2014-2019?

Eliana Siti Sugiharti, 2020

ANALISIS PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Apakah terdapat pengaruh Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah tahun 2014-2019?
5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara Inflasi, produk domestik bruto, dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengetahui dana pihak ketiga, tingkat Inflasi, produk domestik bruto, dan bagi hasil bank umum syariah di Indonesia pada periode tahun 2014 – 2019.

Tujuan lainnya yakni mengetahui pengaruh antara tingkat Inflasi, produk domestik bruto dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah pengetahuan, baik untuk masyarakat ataupun bagi Bank Umum Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi kepada para praktisi dalam bidang yang mempunyai kaitan dengan masalah yang dibahas dalam masalah penelitian ini. Dengan harapan agar dapat digunakan sebagai bahan masukan kinerja perbankan Syariah sehingga dapat digunakan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di dalam upaya peningkatan kinerja perbankan Syariah pada waktu yang akan datang.